

EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT TERHADAP ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Gleydi Natalia Taroreh¹

Ronny Gosal²

Welly Waworundeng³

Abstrak

Status kecamatan saat ini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, fungsi kecamatan selain koordinasi juga sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur hubungan pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan camat memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling, yaitu sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7% sedangkan 38.3% di pengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini dan terlihat bahwa variabel pengawasan camat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di lingkup Kecamatan Motoling. Hubungan parsial antar indikator antar variabel dalam penelitian ini ditemukan bahwa indikator aturan hukum dan transparansi berpengaruh dalam meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, sedangkan indikator akuntabilitas dan berkeadilan tidak signifikan dapat mempengaruhi kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pemerintahan Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga sangat penting sebagai penggerak utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

Kecamatan Motoling merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, yang terdiri dari sebanyak 7 Desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.000 jiwa. (Sumber wawancara dari Sekretaris Kecamatan Motoling, 07 Maret 2018). Berdasarkan observasi akan muncul sebuah asumsi dalam efektivitas pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan terlaksananya hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa baik pengawasan terhadap Lomba antar Desa dan Orde kyur dapat terlaksana dengan pengawasan langsung dari camat, hal ini juga akan berpengaruh terhadap cara kerja camat dalam pengawasan kegiatan ini. Efektivitas pengawasan camat dapat mendukung pelaksanaan umum pemerintahan kecamatan motoling, sehingga tujuan akhir dapat tercapai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dikecamatan motoling kabupaten minahasa selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dikecamatan motoling. Selanjutnya dilakukan argumentasi data dan kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pemerintah kecamatan merupakan tumpuan atau ujung tombak dalam berbagai program kegiatan pemerintah dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara baik, maka perlu terlaksananya suatu sistem pemerintahan yang baik dan keberhasilan tersebut sangatlah ditentukan oleh aparatur pemerintah. Oleh sebab idealnya seluruh aparatur yang ada didalam pemerintahan adalah orang yang berkualitas, baik dalam suatu kriteria yang dibutuhkan dengan memenuhi syarat sesuai dengan bidang tugasnya, maupun motivasi, disiplin dan kejujurannya dalam pelaksanaan kerjanya guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan maka aparatur pemerintah harus lebih mampu dan tanggap dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memberikan pelayanan dibidangnya masing-masing.

Peran pemerintah kecamatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, Camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal. Dalam bidang pemerintahan aparat pemerintah

diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat bangsa dan bernegara. Efektivitas merupakan salah satu ukuran dari pelaksanaan pekerjaan (*performance*). Untuk mengukur efektivitas organisasi akan sangat tergantung dari bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan Edi (2007:13) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Kerangka Teori

Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Handyaningrat S. (2006:16).

Menurut Siagian (2011:32) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Bannard dalam Prawirosentono (2008:27) yang mengatakan bahwa

efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Steers (dalam Sutomo, 2010:59) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas adalah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, persepektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meski tampaknya sering saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut seberapa jauh susunan organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa

jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya didalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga didalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. (Makmur 2015:45).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi, ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Agung Kurniawan (2005:109).

Indikator Efektivitas

Kriteria efektivitas oleh Sutrisno Eddy dalam makmur (2015:7) antara lain:

1. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
2. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
3. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
4. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.
5. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari kelima indikator yang dijelaskan oleh Sutrisno eddy tersebut yang akan peneliti gunakan untuk mengkaji penelitian ini, karena dianggap tepat untuk dapat menentukan kesimpulan akhir penelitian apakah program efektivitas pengawasan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan sudah efektif atau masih belum efektif.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. (Steers, 2010:17).

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaituberasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”, selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa. Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah adalah pelayanan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan sert tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada

pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kusnardi dan Saragih (2008:122).

Pemerintahan diartikan segai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktural lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yaitu berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah (Sutrisno Eddy 2007:89).

Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan

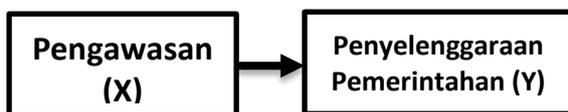
Edelman (2010:22) melihat kualitas pelayanan itu dari berbagai segi, yakni dari segi penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan masyarakat atau konsumen). Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

1. Kesederhanaan Proses, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit,

- mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan Prosedur ,yang mencakup :
 - Rincian biaya atau tarif pelayanan publik.
 - Prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif.
 3. Kepastian waktu Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 4. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
 5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Adanya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan

- Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.
- b. Jika semakin besarnya pengawasan dalam hal urusan pemerintahan yang ada di desa maka akan semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :
 - Ho = *Pengawasan* tidak berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Ha = *Pengawasan* berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian ini akan berusaha mendapatkan data melalui kuesioner penelitian terhadap responden penelitian. Menurut Sugiyono (2014:13)

Variabel adalah sebagai suatu karakteristik dari orang, obyek, atau gejala yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Variabel merupakan faktor yang sangat penting dan perlu dipahami, karena sangat berpengaruh sebagai tempat berpijak dalam menentukan hipotesis penelitian (Sandjaja, 2006:81). Definisi operasional dipergunakan untuk memberi presepsi yang sama pada

semua orang tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam definisi operasional variabel, peneliti menjelaskan karakteristik yang di amati, cara mengamati, dan cara mengukur sesuai dengan kriteria objektif yang ditetapkan beserta dengan skala pengukuran. Skala pengukuran yang dimaksud untuk dapat menganalisa data variabel yang diamati. Sandjaja (2006:95)

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *pengawasan*, yaitu perwujudan dari efektivitas yang baik mengambil prinsip-prinsip *pengawasan* pada pemerintah desa di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Indikatornya sebagai berikut:

- **Aturan hukum (*rule of law*).**

- Penegakan hukum secara utuh
- Peraturan hukum dan hak asasi (semua orang mendapatkan pelayanan)

- **Transparansi.**

- Kebebasan aliran informasi
- Kebebasan akses informasi

- **Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*).**

- Pengarahan proses pelayanan tepat dengan sasaran (kebutuhan masyarakat)
- Proses pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada

- **Akuntabilitas (*accountability*).**

- Pertanggung jawaban kepada masyarakat
- Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan tanggung jawab

- **Berkeadilan (*equity*).**

- Pemberikan pelayanan yang setara kepada semua masyarakat.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu pemberian pelayanan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Motoling. Indikatornya sebagai berikut:

- **Kesederhanaan Proses**

- Sosialisasi secara cepat dan tepat
- Prosedur yang mudah dipahami

- **Kejelasan Prosedur**

- Biaya dan prosedur
- Tata cara umum baik teknis ataupun administratif.

- **Kepastian waktu Pelayanan**

- Pelayanan dan sosialisasi selesai sesuai waktu yang di tentukan

- **Kemudahan akses.**

- Lokasi dan sarana prasarana memadai
- Pemanfaat Sistem informasi dan telekomunikasi

- **Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.**

- Sikap kesopanan dan santun dalam pemberian pelayanan
- Keramahan kepada masyarakat.

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat

serta staf pegawai kantor dan masyarakat Kecamatan Mapanget Kota Manado yang berjumlah 50 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2016:81). Mengutip dari pendapat dari Arikunto (2010 : 134-185) yang menyatakan bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang maka sampel diambil secara keseluruhan, sedangkan populasi di atas 100 maka sampel diambil 10%-15% atau 20%-25% dari populasi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang terdiri dari 20 pegawai dan 20 masyarakat.

Hasil Penelitian

Dalam mengukur efektivitas pengawasan camat, peneliti menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang dibagikan kepada responden. Untuk menguji kebenaran hipotesis pada penelitian maka digunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis korelasi dan regresi sederhana. Di dalam memproses data dilakukan perhitungan dengan program software komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21.0. Semua pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan lima kategori (5, 4, 3, 2, dan 1), oleh karena itu berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui persamaan regresi sederhana seperti pada penjelasan dan tabel di bawah ini:

Dari hasil yang diperoleh persamaan regresi;

$$Y=a+b.X$$

Dimana:

Y = Nilai Variabel Dependen

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X = 0

b = Koefisien Regresi

X = Nilai Variabel Independen

Oleh karena itu dapat diperoleh sebagai berikut:

Y: 14.019 + 0.685 Penyelenggaraan pemerintahan desa

- a. Dengan signifikansi 0.000 ($Y < 0,05$) menunjukkan adanya hubungan linier yang positif antara efektivitas pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Koefisien regresi sebesar 0.685 berarti setiap kenaikan nilai pengawasan camat sebesar 10 satuan, menyebabkan kenaikan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 0.685 atau dengan kata lain 68.5%.
- b. Koefisien korelasi sebesar 0.785 dan juga signifikan menunjukkan bahwa adanya hubungan keterkaitan antara efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya pada analisis regresi. Kuadrat dari koefisien korelasi (r^2) dikenal dengan koefisien korelasi determinasi sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7%. Hal ini memberi arti bahwa keragaman penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di jelaskan oleh pengawasan camat sebesar 61.7%, Lainnya sebesar 39.3% di pengaruhi oleh faktor lain selain pengawasan camat.
- c. Koefisien Korelasi Pearson antara efektivitas pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 0.785 dengan nilai Sig sebesar 0.000.
- d. Nilai Durbin-Watson (DW) pada tabel model summary digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas. Aturan

keputusannya adalah jika nilai DW lebih kecil dari minus (-2), maka bisa diartikan terjadi gejala autokorelasi positif. Jika nilai DW lebih besar dari (2), maka bisa diartikan terjadi gejala multilineritas negatif, sedangkan jika nilai DW antara minus (-2) sampai (+2), maka dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan nilai F hitung sebesar 61.182 dengan Sig adalah 0.000. Dengan mencari pada tabel F, dengan $v_1=1$ dan $v_2=38$ dengan kondisi dimana nilai F hitung lebih besar tabel dan sig yang lebih kecil daripada alpha (0,05) maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah menolak H_0 yang berarti koefisien korelasi signifikan secara statistik.

- e. Hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 14.019 dengan t hitung sebesar 4.282 dan nilai Sig sebesar 0,000 koefisien slope pengawasan camat adalah sebesar 0,685 dengan nilai t hitung sebesar 7.822 dan nilai Sig sebesar 0.000. Nilai t tabel untuk uji ini adalah sebesar 1,68 yang di peroleh alpha 5% dan df sebesar 39 (n-1). Jika di bandingkan dengan nilai t hitung koefisien konstanta dengan t tabel, terlihat bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai sid lebih besar dari alpha (5% atau 0.05) maka kesimpulan yang bisa di ambil adalah menerima H_0 yang berarti

koefisien konstanta adalah tidak signifikan secara statistik.

- f. Variabel Efektivitas Pengawasan Camat (X) berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y). ini berarti bahwa jika semua variabel independen sama dengan nol maka penyelenggaraan pemerintahan desa diprediksikan menjadi 14.019.

Hubungan antara aturan hukum dengan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan berada pada nilai rata-rata 0,48 artinya hubungan tersebut berada pada kategori sedang, sedangkan aturan hukum dapat mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan hanya sebesar 23,94% artinya terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan diluar aturan hukum yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Selanjutnya mengenai transparansi dengan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan terdapat nilai hubungan sebesar 0,66 dalam kategorisasi interpretasi nilai koefisien korelasi angka tersebut berada pada kategori hubungan yang kuat, hal ini dapat interpretasikan bahwa transparansi sangat berhubungan dengan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dan pengaruh transparansi terhadap kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan adalah sebesar 44,27%,

terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan diluar transparansi sebesar 64,25% yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Sedangkan uji parsial untuk indikator akuntabilitas terhadap kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan diperoleh nilai hubungan rata-rata sebesar 0,68% termasuk pada kategori hubungan yang kuat, artinya akuntabilitas mampu memotivasi agar dapat meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan aparatur desa dalam bekerja, sehingga akuntabilitas dapat mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan adalah sebesar 46,96% dan faktor lain yang mempengaruhi adalah sebesar 53,61% yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dengan demikian ada sebesar 64,64% faktor yang dapat mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan diluar aturan hukum, trnsparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan, faktor-faktor tersebut dapat berupa pemberian reward bagi pegawai, kompensasi/penggajian yang lebih tinggi, masalah keluarga pegawai, jarak rumah tinggal dengan kantor pegawai, dan hal-hal lainnya.

Mencermati hasil penelitian mengenai nilai hubungan dan pengaruh antar indikator pada masing-masing variabel penelitian ini, dapat interpretasikan bahwa kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan sangat erat hubungannya dengan aturan hukum dan transparansi,

akuntabilitas yang ada di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aturan hukum dan akuntabilitas dapat meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, sedangkan khusus untuk indicator efektivitas dan efisiensi dapat mempengaruhi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan tidak signifikan berpengaruh.

Kesimpulan

1. Hubungan parsial antar indikator antar variabel dalam penelitian ini ditemukan bahwa indikator aturan hukum dan transparansi berpengaruh dalam meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, sedangkan indikator akuntabilitas dan berkeadilan tidak signifikan dapat mempengaruhi kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
2. Efektivitas pengawasan camat memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling, yaitu sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7% sedangkan 38.3% di pengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini dan terlihat bahwa variabel pengawasan camat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di lingkup Kecamatan Motoling.

Saran

1. Perlu terus dilakukan pengawasan yang lebih efektif lagi kepada pemerintah desa dalam

- penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui koordinasi yang berlangsung secara terus menerus dan melakukan bimbingan langsung yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan.
2. Perlu terus meningkatkan pengawasan yang sesuai dengan tupoksi semua unit-unit dalam kantor jangan mengabaikan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku agar hasil pengawasan dan penyelenggaraan semakin lebih baik dan akan menjadi yang terbaik.
 3. Perlu adanya pengenalan akan konsep *Efektivitas Pengawasan* yang baik kepada pegawai kantor Kecamatan Motoling dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepada masyarakat.
 4. Perlu ada peningkatan perihal transparansi dalam prosedur pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepada pegawai kantor Kecamatan Motoling dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
 5. Diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Motoling.
 6. Pegawai kantor Kecamatan Motoling perlu meningkatkan pengawasan yang efektif kepada masyarakat demi menunjang kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. dan Theresia D. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Cetakan: Pertama.* Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Edelman, W. 2010. *Memahami Good Government dan Good Corporate.* Yogyakarta: YPAPI
- Fathoni, A. 2006. *Organisasi dan Kepemimpinan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah, N. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah.* Bandung: Pusaka Banin Quraisy.
- Handayani, S. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Hj Masagung
- Kartono, K. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Jakarta: Grafindo
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Makmur, H. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Prawirosentono, S. 2008. *Perencanaan dan Penyelenggaraan Sumber daya Manusia.* Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduwan. 2012. *Pengantar Statistika Sosial.* Bandung: Alfabeta.
- Steers. M.R. 2010. *Efektivitas Organisasi: Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin.* Jakarta: Erlangga.
- Sandjaja, B dan Albertus. H. 2006. *Panduan Penelitian.* Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Siagian, M. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kesehatan.* Medan: Grasino Monoratama.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif.* Bandung: PT. Refika Aditama.

- Soetomo. 2010. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edi. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Giovano, T. 2017. *Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. Manado. Unsrat
- Firginia L T dan Tamponganggoy D. 2016. *Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. Manado. Unsrat